



Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo

Cici Devirawaty Ismail^{1*}, Roy Hasiru², Agil Bahsoan³, Radia Hafid⁴,
Meyko panigoro⁵

1-5 *Economic Education Departement, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia*
Email: ismaileicin0@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine how the Government Financial Accounting System is implemented at the Batudaa Sub-District Office and whether its implementation aligns with the Government Accounting Standards regarding the presentation of financial statements. Two key informants were selected, and data collection techniques included documentation, observation, and interviews. The study method employed is qualitative descriptive, which describes the study variables qualitatively. The findings indicate that the Batudaa Sub-District Office has successfully implemented the Government Financial Accounting System using a computerized SIPD system. This has resulted in efficient financial reporting that better benefits stakeholders, including users and auditors, by delivering more comprehensive information. The data generated is relevant, reliable, comparable, and understandable, facilitating easier decision-making. This success is supported by adequate human resources, technology, and facilities. However, the office frequently experiences delays in financial reporting, which affects the timely preparation of financial statements.

Keywords: *Government Financial Accounting System, SIPD System*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Batudaa dan Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pada Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Tentang Penyajian Laporan Keuangan dengan Mendapat 2 orang sebagai informan kunci sedangkan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian pada aspek pemahaman secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Camat Batudaa telah Menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP) dengan menggunakan Sistem SIPD dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih Relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga mudah dalam pengambilan keputusan hal ini didukung dengan adanya faktor pendukung yaitu sumber daya manusia yang memadai, teknologi yang memadai serta fasilitas dan perlengkapan yang memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Akan tetapi Kantor Camat Hampir sering mengalami keterlambatan dari segi pelaporan keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan disusun sesuai dengan tengak waktu yang berikan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP), SISTEM SIPD

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (SAP, 2016). Untuk lebih mengetahui tentang sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan Negara, maka mesti diketahui bagaimana sistem administrasi keuangan Negara di selenggarakan atau di terapkan. Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan pemerintah diharapkan semua aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan yang di maksud adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapkan secara menyeluruh mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Sistem informasi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan yang ada di pemerintahan.

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan adalah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Negara. Adapun pengertian dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar kan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan-undangan, sedangakn akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan.

Penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan yang di maksud adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapkan secara menyeluruh. Sistem akuntansi keuangan di sebuah instansi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan

dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Fenomena berdasarkan wawancara awal mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Penerapan PSAP No 01 tentang penyajian laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Terkait dengan penelitian PSAP No 01 Kantor Camat Batudaa harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, pelatihan sumber daya manusia dan penyedia sarana dan prasarana untuk

menunjang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Namun dalam penyajiannya dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya berbeda – beda, ada yang belum maksimal ada yang sudah maksimal. Sumber daya manusia merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kinerja dalam meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kantor Kecamatan Batudaa merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Kinerja dalam laporan keuangan merupakan hal yang terpenting dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka perlu adanya kinerja yang baik sehingga penyusunan laporan keuangan dapat terlaksana dengan maksimal dan tersusun dengan baik. Pengelolaan Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa Kantor Kecamatan Batudaa merupakan salah satu Kantor Kecamatan yang penyusunan laporan keuangannya belum maksimal, dikarenakan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penyusun laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan dari bidang Akuntansi. Sehingga hal ini dapat mempersulit terkait dengan pergantian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru, karena mereka harus lebih bekerja keras untuk memaksimalkan pemahaman mereka terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Haikal Fikri (2023), yang berjudul Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sei Suka bahwa Sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Kantor Camat Sei Suka tidak ada pemisahan yang dilakukan dalam pencatatan. Transaksi yang menyebabkan pengeluaran dan penerimaan kas hanya dicatat didalam buku kas umum. Pemerintah pada Kantor Camat Sei Suka belum menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan PeraturannNomorr24 Tahun 2005 dan PeraturannMentri Dalam Negeri Nomorr13 Tahun 2006.

Menurut Ranti Sri Wulandari (2021). Hasil penelitian terhadap Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Kuantan Tengah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019 tingkat kesesuaian penerapan pada Kantor Camat Kuantan Tengah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan dinilai cukup baik karena di dalam laporan keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah masih terdapat laporan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2005 : 4).

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah dengan prosedur yang sistematis untuk mendapatkan tujuan tertentu dan juga bagaimana prosedur penelitian dilaksanakan. Penelitian ini memfokuskan pada pengalaman subjektif berdasarkan realitas atas masalah masalah dalam Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo.

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019).

1. Pengumpulan Data Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan- bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi (Sugiyono, 2019).
2. Reduksi Data Menurut Sugiyono (2019), data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2019).
3. Penyajian Data Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2019).
4. Kesimpulan dan Verifikasi Data Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian ini mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo, dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggunakan dan menggali data berdasarkan apa yang di ucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan melalui teknik pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti memiliki 2 informan yang sama-sama bergerak pada bagian keuangan. Dimana Kantor Camat Batudaa telah menerapkan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Batudaa merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk mengelola dan melaporkan keuangan entitas pemerintah dengan tepat, transparan dan akuntabel. Dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas pada Kantor Camat Batudaa tersebut dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dalam proses transaksi telah berstandar komputerisasi. Pada Kantor Camat Batudaa pegawai sub bagian perencanaan dan keuangan dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.

Dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah diIndonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Penerapan PSAP No 01 tentang penyajian laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.

Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Namun dalam penyajiannya dari setiap Kecamatan yang

ada di Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya berbeda-beda, ada yang belum maksimal ada yang sudah maksimal dalam hal ini Sumber daya manusia merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kinerja dalam meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kantor Camat Batudaa merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Kinerja dalam laporan keuangan merupakan hal yang terpenting dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka perlu adanya kinerja yang baik sehingga penyusunan laporan keuangan dapat terlaksana dengan maksimal dan tersusun dengan baik.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian mengenai analisis penerepan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, hingga elemen lain dengan tujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik daerah tersebut. Dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan pemerintah diharapkan semua aktifitas di dalam instansi tersebut dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kantor Camat, sebagai unit pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan, memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah di Kantor Camat adalah langkah yang penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara di tingkat kecamatan dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah yang baik akan mendukung pengelolaan anggaran yang tepat, meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pencatatan yang rapi, pelaporan yang jelas, serta pengawasan yang ketat, Kantor Camat dapat mengelola keuangan dengan lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Fokus Penelitian dijelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini Untuk Mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah sehingga temuan Penelitian Pada Kantor Camat Batudaa telah sepenuhnya Menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP) dengan menggunakan Sistem SIPD dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih Relevan,andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga mudah dalam pengambilan keputusan hal ini didukung dengan adanya faktor pendukung yaitu sumber

daya manusia yang memadai, teknologi yang memadai serta fasilitas dan perlengkapan yang memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Vira Saputri Yuniar (2021) dengan menggunakan metode kualitatif Deskriptif dalam penelitiannya, mengemukakan hasil temuan ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan pada Kantor Kecamatan Makassar telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua sistem akuntansi keuangan telah dijalankan dengan baik.

Dari laporan keuangan Kantor Camat Batudaa yang telah peneliti paparkan di atas menggambarkan bahwa tidak ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangannya, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan, akan tetapi seluruh hasil laporan keuangan tersebut dilakukan oleh pihak atau bagian Kasubag Perencanaan dan Keuangan dari Kantor Camat Batudaa. Mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah yang dilakukan oleh Kantor Camat Batudaa dikatakan cukup optimal begitu juga dengan output yang dihasilkannya yaitu laporan keuangan yang bisa digunakan bagi para pemangku kepentingan.

Seperti yang diketahui tugas pokok dan fungsi Kasubag Perencanaan dan Keuangan adalah mengordinasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan serta aset yang dimiliki oleh suatu instansi. Kualitas Laporan Keuangan memiliki syarat diakuntansikan dengan benar. Dalam laporan keuangan dimana setiap unsur-unsur laporan keuangan dilaporkan secara lengkap. Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca. Di audit secara Independent. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan auditor independent. Hal ini di sebabkan audit laporan keuangan yang dihasilkan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan kantor camat. Dengan adanya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah di Kabupaten Gorontalo Khususnya Kantor Camat Batudaa diharapkan mampu menghasilkan laporan Keuangan yang berkualitas sebab laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik

Dengan adanya akuntabilitas kantor camat batudaa sudah sangat jelas mempertanggung jawabkan laporan keuangan dalam menggunakan Sistem SIPD sehingga sistem ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan dengan transparansi, akurasi, dan integritas dengan adanya sistem akuntansi yang baik. Dengan demikian, akuntabilitas dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah bukan hanya tentang mematuhi aturan dan regulasi, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas ini mencakup kewajiban entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, memberikan penjelasan atas penggunaan dana publik, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah merupakan fondasi untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara transparan dan bertanggung jawab melalui mekanisme pengawasan yang efektif, pelaporan keuangan yang transparan, serta peningkatan kapasitas institusional dan teknologi informasi adalah langkah-langkah penting untuk mewujudkan akuntabilitas ini. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.

Kenudian dalam hal Transparansi dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah adalah elemen fundamental untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah korupsi serta penyalahgunaan dana publik. Pembahasan ini akan mengeksplorasi pentingnya transparansi, mekanisme yang digunakan untuk mencapainya, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk meningkatkan transparansi dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Transparansi dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat batudaa dapat pastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memudahkan dalam pembuatan kinerja keuangan pada periode selanjutnya. Mekanisme transparansi, seperti publikasi laporan keuangan, audit eksternal, dan partisipasi publik, memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan seperti keterbatasan teknologi, kompleksitas birokrasi, dan kurangnya kapasitas SDM harus diatasi melalui strategi yang tepat, termasuk implementasi teknologi informasi, peningkatan kapasitas staf, dan penguatan regulasi. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian pada aspek pengawasan dilakukan dengan baik, kepala camat selalu melakukan pengawasan penggunaan anggaran terhadap internal keuangan melalui audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi. Serta Bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Pengawasan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah proses yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Pembahasan ini akan mengeksplorasi peran pengawasan, mekanisme yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk memperkuat pengawasan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Pengawasan merujuk pada proses pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap kegiatan keuangan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan dengan adanya pengawasan ini kantor camat Batudaa Kabupaten Gorontalo dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan, kecurangan, serta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pengawasan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Unit audit internal bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap kegiatan keuangan pemerintah secara rutin. Audit internal mencakup evaluasi terhadap sistem kontrol internal, kepatuhan terhadap kebijakan, dan penilaian terhadap efisiensi operasional. Audit Eksternal sendiri Dilakukan oleh pihak independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor eksternal, untuk mengevaluasi dan mengaudit laporan keuangan pemerintah. Audit eksternal memberikan penilaian independen atas kepatuhan dan kualitas laporan keuangan. Pengawasan juga melibatkan publikasi laporan keuangan secara terbuka dan akses yang mudah oleh masyarakat, sehingga hasil audit dan informasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengawasan yang efektif dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah adalah kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan penguatan audit internal, kolaborasi yang baik dengan auditor eksternal, penggunaan teknologi informasi yang tepat, dan peningkatan transparansi, pemerintah dapat meminimalkan risiko kecurangan, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi strategi yang tepat dapat membawa perubahan positif dalam pengawasan keuangan pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan di Kantor Camat adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintah yang sesuai dengan regulasi yang ada, Kantor Camat dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan benar, anggaran digunakan secara efisien, dan laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan.

Penerapan akuntansi pada Kantor Camat berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui sistem akuntansi yang terorganisir dan transparan, Kantor Camat dapat memaksimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah pedoman yang mengatur bagaimana transaksi keuangan harus dicatat, diproses, dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. PSAP ini berlaku di seluruh unit pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk di Kantor Camat, PSAP juga mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhinya. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengelola keuangan daerah. Dalam konteks analisis penerapan sistem akuntansi pemerintah, Sistem SIPD memungkinkan entitas pemerintah daerah untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi. Hal ini mencakup penerimaan, pengeluaran, dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pencatatan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti prinsip akrual atau kas, tergantung pada kebijakan yang diterapkan.

Dengan diberlakukannya SAP peraturan pelaksana dan sistem akuntansi sudah pasti berubah, demikian pula dengan kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan karena SAP dengan menggunakan sistem SIPD dalam penyajian laporan keuangan memang memberikan informasi keuangan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa dalam Penerapan Akuntansi sudah Sesuai Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan daerah yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, penyajian laporan keuangan secara keseluruhan terkait penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah di Kantor Camat Batudaa termasuk ke dalam katagori baik hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Jukhairia Ritonga (2023) dengan menggunakan metode kualitatif Deskriptif dalam penelitiannya, mengemukakan hasil temuan ini menunjukkan bahwa Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kantor Camat Sunggal dengan PP.No 71 Tahun 2010 Tentang Kualitas Laporan Keuangan dengan pedoman yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan baik apabila memenuhi empat karakteristik laporan keuangan agar dapat terwujudnya informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya serta bisa bermanfaat untuk berbagai pihak yang memerlukan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, pihak kantor camat menginformasikan bahwa mereka telah membuat seluruh komponen laporan keuangan pada Kantor Camat Batudaa, sehingga pada hasil yang diperoleh dari data laporan keuangan kantor Camat Batudaa dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan.

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni Sistem Akuntansi Pemerintah. Sehingga informasi mengenai penyajian Laporan Keuangan yang dihasilkan dikatakan sudah akurat karena informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan akan tetapi dari ketepatan waktu kantor

camat batudaa masih hampir sering mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan, sehingga kantor camat batudaa mendapat tengak waktu yang sangat singkat untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan yang sudah mengalami keterlambatan dalam pelaporan dengan demikian penyajian laporan keuangan sudah disediakan selengkap

SARAN

1. Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat sudah cukup baik digunakan akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah keterlambatan dalam pelaporannya dalam penyusunan laporan keuangan agar tidak menjadi penghambat dalam pelaporan keuangan sehingga dapat dilaporkan tepat waktu serta dalam upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) diharapkan agar lebih meningkatkan pemberian pendidikan dan pelatihan karena sangat dibutuhkan dalam ketidaksesuaian latar belakang pendidikan terutama bagi mereka yang berlatarbelakang non akuntansi.
2. Agar kualitas laporan keuangan di kantor Camat Batudaa mempunyai mutu yang lebih baik, dapat dilakuka dengan pembuatan pelatihan khusus bagi parapegawainya yang memiliki wewenang mengenai sesuatu finansial dan diberikan saran juga untuk memfokuskan pegawainya dengan pendidikan ekonomi atau akuntansi sebagai tugas pengurusan finansial di Kantor tersebut sebab pengetahuan yang telah mereka miliki tentang keuangan lebih baik serta guna beberapa hambatan berupa kurang paham terhadap perubahan sistem yang terkesan cepat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya berdasarkan sebatas analisa yang diperoleh peneliti dari pendapat dan ungkapan dari hasil wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumen berupa hasil laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu instansi pemerintah sehingga memiliki keterbatasan generalisasi. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya tentang akuntansi pemerintahan disarankan juga dilakukan pada kantor camat lainnya atau memperluas objek penelitian.

REFERENSI

Adrian Sutedi & Bastian Indra (2011) "Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-tiga. Erlangga. Indonesia."

A.Abdurrachman. (2014). "Ensiklopedia *Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: PT. Pradya Paramitya."

Baso R, dkk, (2021). "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang."

Cristy Soputan, (2015). "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan

pp nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Manado, Indonesia Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011. Bandung : Alfabeta.”

Haikal Fikri & Kamilah, (2023). “Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sei Suka.”

Ignasia Tesalonika Nukak & Inggriani Elim & Lady Diana Latjandu, (2021). “Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.”

Ristika Besinung, dkk, (2019). “Analisis Penerapan Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Di Tondano”

Sakti Omar, (2015). “Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD. Salemba Empat. Jakarta. Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Pusat Dan Daerah.”

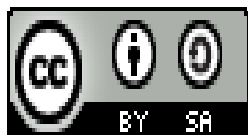
Sugiono. (2019). “*Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.”

Tim evaluasi (2002). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (buku 4 evaluasi pembiayaan dan informasi keuangan daerah). Jakarta.

Umni Fatmawati, (2023). “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pada Kantor Camat Pontianak Timur.”

Vira Saputri Yuniar, (2021). “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota Makassar (Studi Kasus Kantor Kecamatan Makassar).”

Wirja Wahyu Pratama (2020), “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara).”



This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Editorial of JEBE : Economic Education Study Program, Faculty of Economics and Business Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.